

Makalah

PEMBERDAYAAN POTENSI DAN PELUANG PEMBANGUNAN DI DESA

Makalah disajikan pada
kegiatan “Diklat Kelegislatifan Desa”
tanggal 5 Juni 2004 di Kabupaten Sukabumi.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNPAD**

**BANDUNG
2004**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang **“Pemberdayaan Potensi dan Peluang Pembangunan di Desa”** telah selesai disusun kembali.

Makalah ini pernah disajikan pada kegiatan *“Diklat Kelegislatifan Desa”* pada tanggal 5 Juni 2004 di Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Desa pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Makalah ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.

Demikian makalah ini disusun dan semoga dapat memenuhi ajuan dimaksud.

Bandung, 26 November 2004

Penyusun,

Pipin Hanapiah, Drs.

NIP. 131832050

Makalah

PEMBERDAYAAN POTENSI DAN PELUANG PEMBANGUNAN DI DESA

Makalah disajikan pada
kegiatan “Diklat Kelegislatifan Desa”
tanggal 5 Juni 2004 di Kabupaten Sukabumi.

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050

Menyetujui:
Dosen Senior,

Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A.
NIP. 131408365

DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Senior	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. Pengertian.....	1
B. Potensi Pembangunan di Desa	1
C. Peluang Pembangunan dari Luar Desa	2
D. Bidang/Aspek Pembangunan	3
E. Cara dan Proses Pemberdayaan	5
F. Sasaran/Target Pemberdayaan	6
G. Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa	7
H. Bentuk Rumusan Aspirasi Masyarakat Desa	9
I. Daftar Pustaka	10

PEMBERDAYAAN POTENSI DAN PELUANG PEMBANGUNAN DI DESA*

Pipin Hanapiah**

A. Pengertian

Pemberdayaan : Cara dan proses peningkatan/pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan/atau yang mungkin ada.

Potensi : Segala sumberdaya yang terdapat di desa.

Peluang : Segala sumberdaya yang terdapat di luar desa.

Pembangunan : Aktivitas membangun yang meliputi segala bidang/aspek/ sektor di desa.

Desa : Wilayah pemerintahan desa yang penuh dengan swadaya dan swadana.

B. Potensi Pembangunan di Desa

1. Sumber Daya Alam (SDA):

1.1 Bukit/pasir yang gundul, tandus, terlantar, dan/atau subur.

* Disajikan pada kegiatan “Diklat Kelegislatifan Desa”, tanggal 22 Maret 2001, di Kabupaten Sukabumi.

** Dosen pada FISIP UNPAD, Bandung.

- 1.2 Bantaran sungai, kali, dan/atau susukan yang rawan longsor.
- 1.3 Sungai, kali, dan/atau susukan yang bersih.
- 1.4 Tanah-tanah pinggiran jalan (hak milik jalan) yang tidak terurus.
- 1.5 Tanah-tanah kebun, tegalan, dan/atau sawah yang tidak terurus.
- 1.6 Tanah-tanah pekarangan/belakang rumah atau bangunan lainnya yang tidak terurus.
- 1.7 Dan sebagainya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM):

- 2.1 Penduduk yang biasa bertani dengan kerja keras.
- 2.2 Penduduk yang ingin bekerja diluar bertani.
- 2.3 Penduduk yang tidak biasa (tidak rajin) bekerja keras.
- 2.4 Penduduk yang biasa aktif (hobi atau “haus”) dalam bidang/aspek tertentu.
- 2.5 Penduduk yang mempunyai (lebih dari cukup).
- 2.6 Tokoh masyarakat desa.
- 2.7 Penduduk yang apatis, oposisi, *trouble-maker*, atau tak acuh.
- 2.8 Dan lain-lain.

C. Peluang Pembangunan dari Luar Desa

1. Sumber Informasi Pembangunan:

- 1.1 Radio, televisi, surat kabar, dsb.

- 1.2 Rapat-rapat instansional.
- 1.3 Informan.
- 1.4 Hasil pengamatan/observasi pihak luar-desa.
- 1.5 Hasil penelitian lembaga-lembaga ilmiah (termasuk Perguruan Tinggi).
- 1.6 Mahasiswa KKN dari Perguruan Tinggi.
- 1.7 Dan lain-lain.

2. Rencana Pembangunan dari Pemerintah:

- 2.1 Rakorbang di tingkat Kecamatan.
- 2.2 Subsidi rutin/insidental dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.
- 2.3 Gagasan/rencana proyek swasta/investor (langsung: dari penghubung; tidak-langsung: pemerintah/instansi terkait).
- 2.4 Dan lain-lain.

D. Bidang/Aspek Pembangunan

1. Bidang Fisik:

- 1.1 Fasilitas umum.
- 1.2 Fasilitas sosial.
- 1.3 Dan lain-lain.

2. Bidang Nonfisik:

2.1 Aspek Ekonomi:

- 2.1.1 Pertanian.
- 2.1.2 Perdagangan.
- 2.1.3 perhutanan/perkebunan.
- 2.1.4 Perternakan.
- 2.1.5 Perkoperasian.
- 2.1.6 Kewirausahaan.
- 2.1.7 Dan lain-lain.

2.2 Aspek Sosial:

- 2.2.1 Keolahragaan.
- 2.2.2 Kegotongroyongan.
- 2.2.3 Kerukuntetangga/kerukunwargaan/kerukunkampungan.
- 2.2.4 Keagamaan.
- 2.2.5 Kepemudaan/kepemudian.
- 2.2.6 Kependidikan.
- 2.2.7 Dan lain-lain.

2.3 Aspek Politik:

- 2.3.1 Keberagaman partai politik.
- 2.3.2 Keberagaman agama.
- 2.3.3 Keberagaman khilafiyah dalam satu agama.

- 2.3.4 Keberagaman dukungan terhadap capres/cawapres.
- 2.3.5 Keberagaman dukungan terhadap cagub/cawagub.
- 2.3.6 Keberagaman dukungan terhadap cabup/cawabup.
- 2.3.7 Keberagaman dukungan terhadap cakades.
- 2.3.8 Keberagaman kepentingan/aspirasi terhadap pembangunan di desa.
- 2.3.9 Dan lain-lain.

2.4 Aspek Kinerja Pemerintahan:

- 2.4.1 Pelayanan publik/masyarakat.
- 2.4.2 Transparansi publik.
- 2.4.3 Pertanggungjawaban publik.
- 2.4.4 Efektivitas pemerintahan.
- 2.4.5 Efisiensi pemerintahan.
- 2.4.6 Komitmen dan keberadaan pemerintah di mata publik.
- 2.4.7 Kepemimpinan yang adil dan jujur/amanah.
- 2.4.8 Dan lain-lain.

E. Cara dan Proses Pemberdayaan

1. Cara-cara (Teknik) Memberdayakan:

- 1.1 Teknik tanya-jawab.
- 1.2 Teknik diskusi/musyawarah.

- 1.3 Teknik observasi-partisipatif.
- 1.4 Teknik penyelidikan/survei.
- 1.5 Teknik informasi (dengan informan-informan atau tokoh-tokoh).
- 1.6 Teknik dokumentasi.
- 1.7 Teknik studi-banding.
- 1.8 Teknik studi-kasus.
- 1.9 Dan lain-lain

2. Proses Memberdayakan:

- 2.1 Mendengarkan dengan baik dan penuh empati.
- 2.2 Mencatatkan dengan baik.
- 2.3 Menjelaskan dengan baik.
- 2.4 Mengajak dengan baik.
- 2.5 Mengerjakan dengan baik (bersama-sama).
- 2.6 Mencontohkan dengan baik.
- 2.7 Mempertanggungjawabkan dengan baik.
- 2.8 Menengahi dengan baik.
- 2.9 Dan lain-lain.

F. Sasaran/Target Pemberdayaan

1. Demokratisasi politik.
2. Egaliterisasi sosial.

3. Persatuan warga.
4. Kebersamaan kerja.
5. Pertumbuhan kesejahteraan ekonomi.
6. Keamanan. Ketertiban, dan kenyamanan lingkungan hidup.
7. Dan lain-lain.

G. Merumuskan Aspirasi Masyarakat Desa

Dalam merumuskan aspirasi masyarakat desa, banyak pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama. Antara desa yang satu dengan yang lainnya, terdapat perbedaan baik dalam jumlah, jenis, maupun bentuk aspirasinya. Desa-desa yang terpencil dengan desa-desa yang terdekat bahkan berada di wilayah pusat perkotaan/pemerintahan memiliki perbedaan hal tersebut.

Di desa-desa terpencil, pada umumnya, yang masyarakatnya relatif lebih bersifat homogen, paternalistik, dan paguyuban; pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra untuk kerjasama sebagai sumber/bahan aspirasi relatif lebih sedikit jumlah dan jenisnya. Pihak-pihak itu misalnya, bila mayoritas masyarakat suatu desa itu bermatapencarian bertani, maka pihak itu adalah para petani atau kelompok petani, atau tokoh masyarakat yang bertani. Aspirasi mereka tidak jauh dari bagaimana agar hasil taninya berlimpah, harga pupuknya terjangkau, airnya mengalir, terhindar dari hama, padinya dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari sebelumnya, dan mendapatkan rupiah

berlebih dari ongkos bertani yang sisanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selain mereka, pihak-pihak lainnya bisa berupa tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, perkumpulan olahraga, perkumpulan kesenian, tokoh pendidik, dan sebagainya. Begitu pula bagi desa-desa yang masyarakatnya beternak, berkebun, nelayan, dan sebagainya.

Di desa-desa yang dekat dengan pusat perkotaan/pemerintahan atau bahkan desa-desa yang berada di wilayah perkotaan, aspirasi masyarakatnya relatif lebih banyak dan beragam (kompleks). Pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra-kerjasama dapat bertambah. Mereka di antaranya adalah para tokoh yang terdapat pada berbagai parpol, berbagai ormas kepemudaan, berbagai agama, berbagai aliran-pemahaman dalam seagama, berbagai pendidik, berbagai LSM, masyarakat usaha di pasar, masyarakat usaha di pertokoan, para petani, para buruh, para pelajar, para mahasiswa, para pegawai negeri sipil, para anggota TNI, perkumpulan masyarakat dari beberapa daerah/etnis, dan sebagainya. Ini semua akan berakibat pada banyak dan beragamnya aspirasi masyarakat masing-masing yang selain banyak persamaannya terdapat juga banyak perbedaannya.

Dalam merumuskan aspirasinya pun sudah jelas memerlukan teknik-teknik yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok masyarakat desa tersebut. Itu semua memerlukan kemampuan dan kemauan Kepala Desa, Perangkat Desa, para Anggota BPD, dan para Tokoh Desa (baik Tokoh Agama,

Tokoh Budaya atau Pendidikan, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Informal) untuk secara proaktif merumuskannya.

H. Bentuk Rumusan Aspirasi Masyarakat Desa

Aspirasi masyarakat desa, dengan demikian, dapat dirumuskan dalam bentuk:

1. Peraturan-peraturan Desa yang sifatnya mengatur, membatasi, melarang, dan memberi sanksi atas pelanggaran aturan yang dilarang demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat desa;
2. Program-program pembangunan desa untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
3. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Program-program/perjanjian-perjanjian kerjasama pembangunan antara pihak Desa dan pihak-pihak lain, baik dengan yang berasal dari dalam maupun dari luar desanya;
5. Prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa;
6. Program-program pembangunan desa yang diusulkan untuk disubsidi/dibiayai oleh Pemerintah tingkat atasnya;
7. Program kerjasama antardesa terdekat.
8. Dan sebagainya.

I. Daftar Pustaka

- Apter**, David E., 1987, **Pengantar Analisa Politik**, Jakarta: LP3ES.
- Dahl**, Robert A., 1991, *Modern Political Analysis* (fifth edition), Prentice-Hall of India.
- Gandhi**, Madan G., 1984, *Modern Political Theory*, New Delhi: Mohan Pramlani.
- Haferkamp**, Hans and Neil J. **Smelser**, 1992, *Social Change and Modernity*, Los Angeles: University of California Press.
- Hague**, Rod, et.al, 1998, *Comparative Government and Politics* (fourth edition: fully revised and updated), London: Macmillan Press Ltd.
- Hidayat**, Setia dan N. Syamsuddin Ch. **Haesy**, 2004, **Sangkakala Padjadjaran: Upaya Awal Mengeja dan Menyingkap Makna Rumpaka**, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata.
- Lijphart**, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, London: Yale University Press.
- McGarry**, John and Brendan **O’leary**, 1993, *The Politics of Ethnic Conflict Regulation*, London: Routledge.
- Plano**, Jack C., et.al., 1985, **Kamus Analisa Politik**, Jakarta: PT Rajawali.
- Sartori**, Geovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Enquiry into Structures, Incentives, and Outcomes* (Second edition), N.Y.: New York University Press.
- Sirait**, Midian, dkk, 1997, **Membangun Masyarakat Pancasila: Dinamika dan Dilemanya**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunardjo**, Unang, 1984, **Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**, Bandung: Tarsito.

Vijayakusuma, 3 Juni 2004